

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Aspek Geografis



Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km² yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, sesuai rincian pada Tabel 2.1.

Secara geografis, letak Provinsi Banten berbatasan dengan:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Provinsi Banten Tahun 2010

Kabupaten/Kota		Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten					
1	Pandeglang	35	324	13	337
2	Lebak	28	340	5	345
3	Tangerang	29	246	28	274
4	Serang	28	320	-	320
Kota					
1	Tangerang	13	-	104	104
2	Cilegon	8	-	43	43
3	Serang	6	30	36	66
4	Tangerang Selatan	7	5	49	54
Provinsi Banten		154	1265	278	1543

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.1.2 Aspek Demografis

1) Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2.2
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 1961-2010

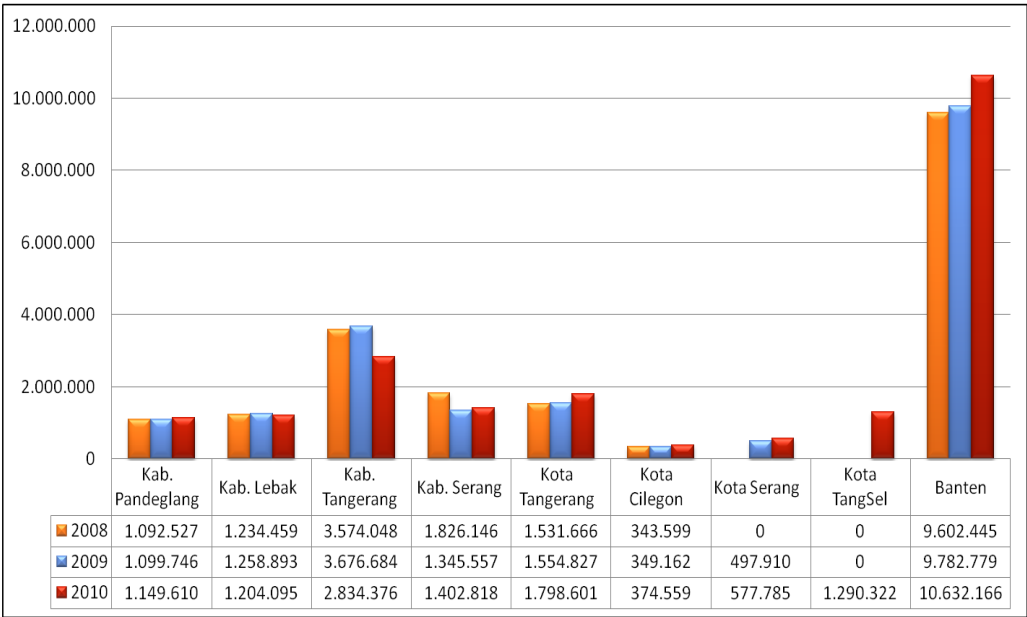
KABUPATEN/ KOTA	1961	1971	1980	1990	2000	2009	2010
Kabupaten							
1. Pandeglang	440,213	572.628	694,759	858,435	1,011,788	1.099.746	1,149,610
2. Lebak	427,802	546,364	682,868	873,646	1,030,040	1.258.893	1,204,095
3. Tangerang*	643,647	789,870	1,131,199	1,843,755	2,781,428	3.676.684	2,834,376
4. Serang**	648,115	766,410	968,358	1,244,755	1,652,763	1.345.557	1,402,818
Kota							
5. Tangerang	206,743	276,825	397,825	921,848	1,325,854	1.554.827	1,798,601
6. Cilegon	72,054	93,057	140,828	226,083	294,936	349.162	374,559
7. Serang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	497.910	557,785
8. Tangerang Selatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,290,322
Banten	2,258,574	3,045,154	4,015,837	5,967,907	8,096,809	9.782.779	10,632,166

Sumber : BPS Provinsi Banten, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010

*) termasuk Kota Tangerang Selatan (kecuali Tahun 2010)

**) termasuk Kota Serang (kecuali tahun 2009-2010)

Gambar 2.1
Grafik Peningkatan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2008-2010



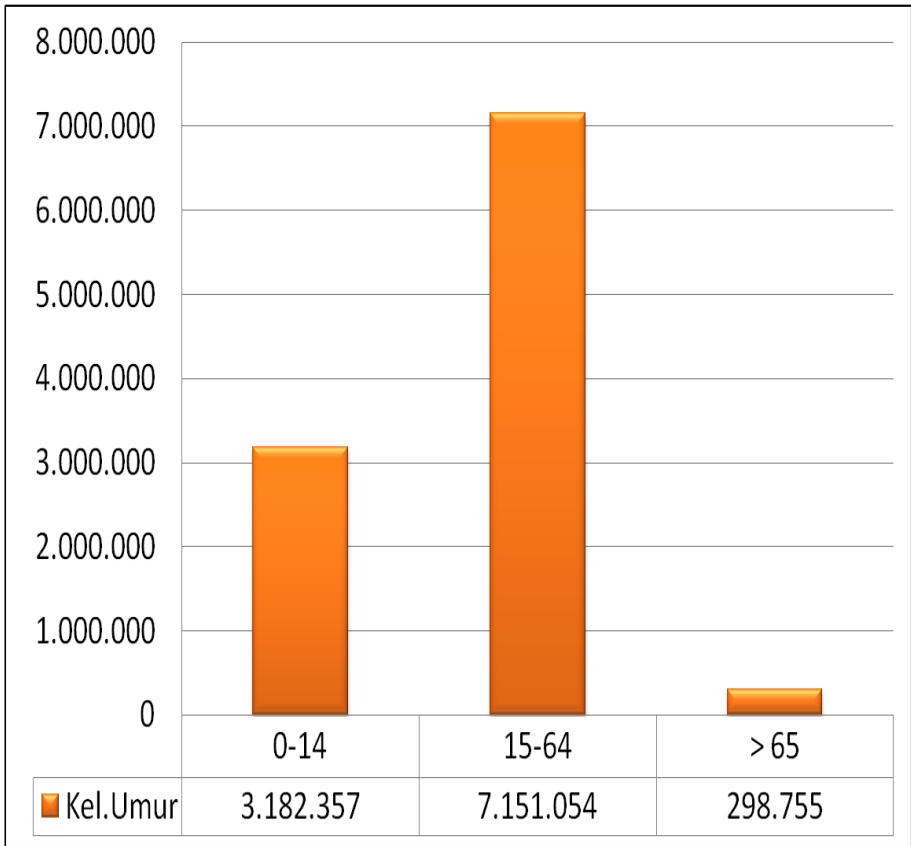
Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Usia di Provinsi Banten
Tahun 2010

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	540 609	509 702	1 050 311
5 – 9	550 916	517 076	1 067 992
10 – 14	549 494	514 560	1 064 054
15 – 19	521 301	497 914	1 019 215
20 – 24	514 698	515 218	1 029 916
25 – 29	540 294	535 167	1 075 461
30 – 34	489 018	487 768	976 786
35 – 39	452 451	425 133	877 584
40 – 44	380 622	345 887	726 509
45 – 49	295 174	265 664	560 838
50 – 54	224 961	197 706	422 667
55 – 59	149 150	123 458	272 608
60 – 64	94 560	94 910	189 470
65 – 69	62 094	66 099	128 193
70 – 74	39 693	49 363	89 056
75 +	34 113	47 393	81 506
Jumlah	5 439 148	5 193 018	10 632 166

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan penurunan laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tiga tahun terakhir untuk setiap kabupaten/kota dapat dilihat Tabel 2.4.

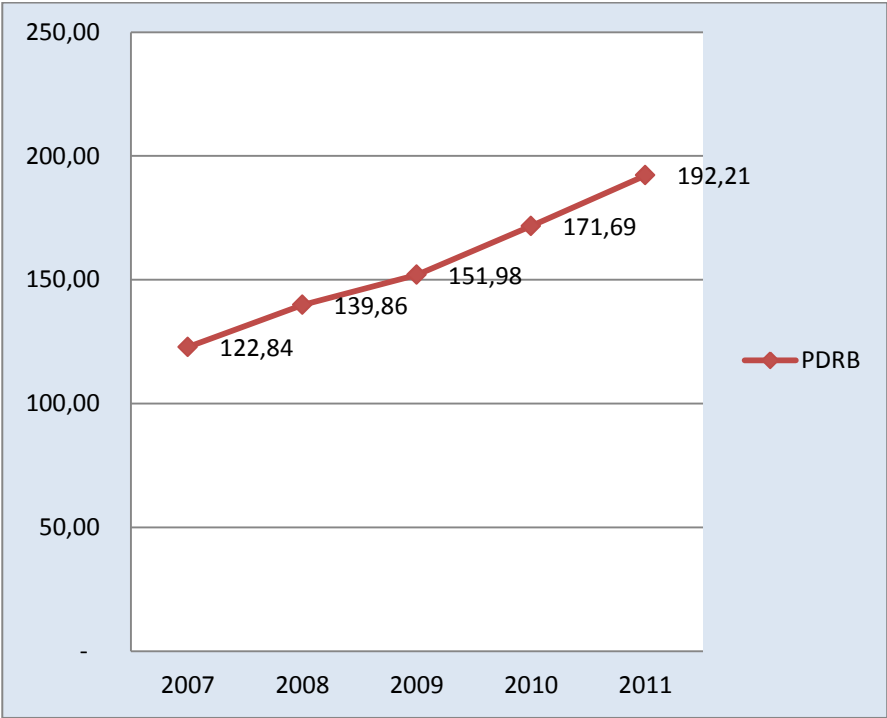
Tabel 2.4
Capaian LPE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2011

NO	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN		
		2009	2010	2011
Kabupaten :				
1	Pandeglang	4,21	6,77	6,81
2	Lebak	4,10	4,15	4,30
3	Tangerang	4,41	6,71	6,41
4	Serang	3,18	3,87	3,96
Kota :				
5	Tangerang	5,74	6,68	7,01
6	Cilegon	4,83	5,01	5,26
7	Serang	5,44	7,63	7,76
8	Tangerang Selatan	8,49	8,70	8,80
Provinsi Banten		4,69	6,08	6,43
Nasional		4,58	6,10	6,50

Sumber : BPS 2012

Struktur Perekonomian Banten sebagian besar kontribusi dari sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih) sebesar 54,80%, kemudian sebesar 37,14% dari sektor tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa). Sementara itu sebesar 8,06% berasal dari sektor primer (sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3.

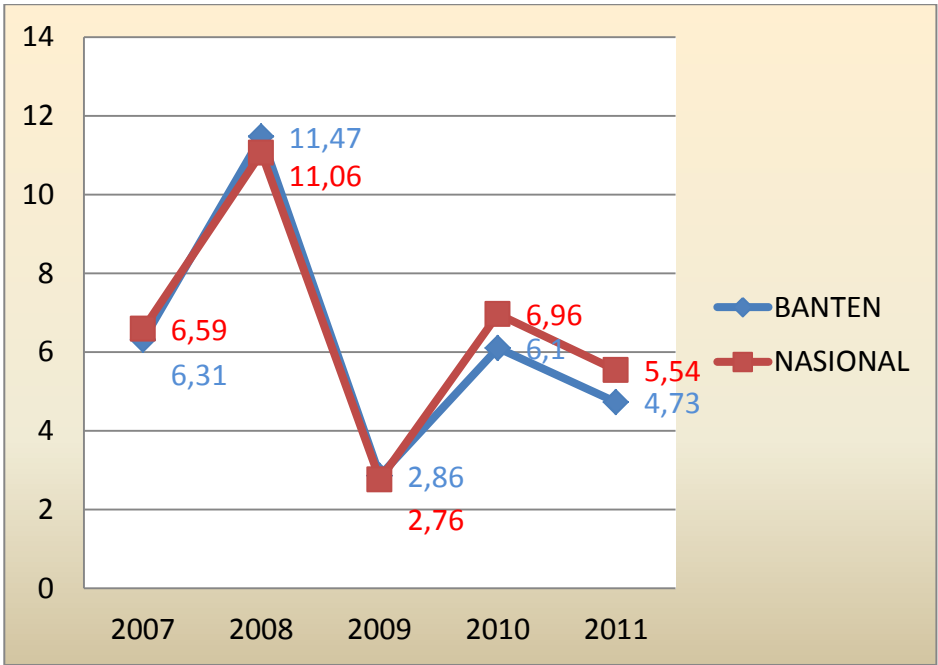
Gambar 2.3
Grafik Perkembangan Nilai PDRB Banten Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2007-2011 (Rp. Juta)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Kondisi inflasi Banten pada level yang rendah didorong oleh relatif stabilnya kondisi pasokan komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta harga-harga komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Provinsi Banten
Tahun 2007-2011 (%)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

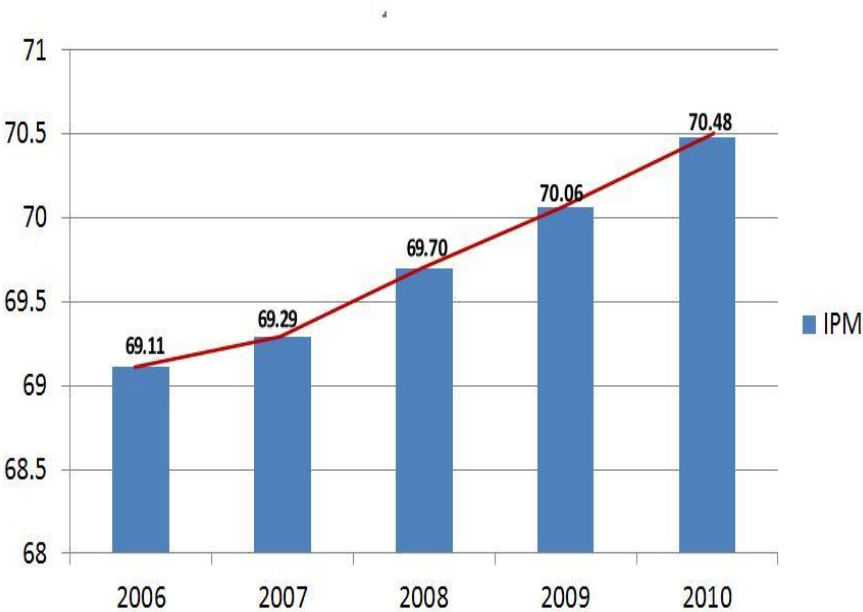
Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial ditandai dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun sebaran capaiannya di kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN	
		2009	2010
Kabupaten:			
1	Pandeglang	67,99	68,29
2	Lebak	67,45	67,67
3	Tangerang	71,45	71,76
4	Serang	68,27	68,67
Kota:			
5	Tangerang	74,89	75,17
6	Cilegon	74,99	75,29
7	Serang	69,99	70,61
8	Tangerang Selatan	75,01	75,38
Provinsi Banten		70,06	70,48

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2009-2010

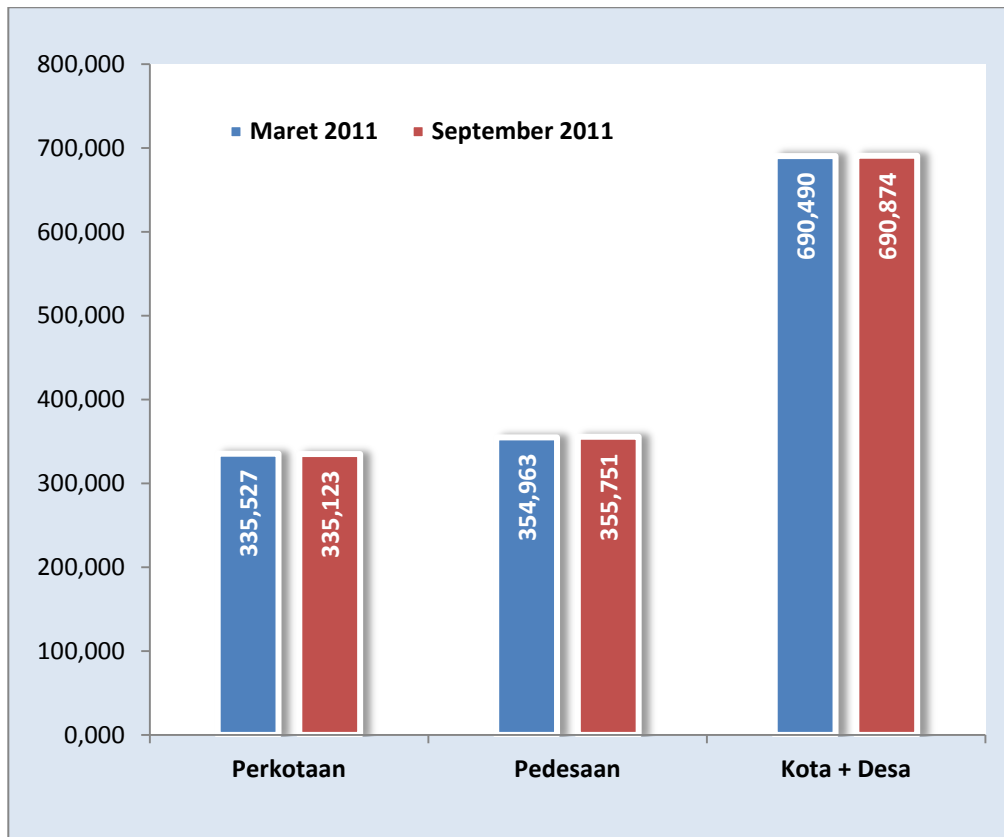
Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Tingkat IPM di Provinsi Banten
Tahun 2006-2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Kondisi penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Januari 2012, sampai dengan September 2011 tercatat sebanyak 690.874 jiwa (6,26%), sedangkan pada Maret 2011 tercatat sebanyak 690.490 jiwa (6,32 persen).

Gambar 2.6
Grafik Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret-September 2011



Sumber : BRS BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susen) 2 Januari 2012

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai diantaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Kinerja layanan pendidikan di Provinsi Banten dari Tahun 2008-2010 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Indikator Pendidikan di Provinsi Banten
Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Angka Melek Huruf (persen)	95,60	95,95	96,20
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,10	8,15	8,32
Angka Partisipasi Sekolah (persen)			
- Usia 7-12 Tahun	97,56	97,85	98,01
- Usia 13-15 Tahun	79,87	80,88	81,70
- Usia 7-15 Tahun	92,03	92,20	92,81
- Usia 16-18 Tahun	48,40	50,00	50,90

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan menentukan kualitas pendidikan, dimana salah satu indikatornya adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Banten, rasio murid-guru untuk tingkat SD, SLTP, SLTA rata-rata masih dibawah 25 murid. Hal ini bukan berarti proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah berlangsung optimal karena penempatan tenaga pengajar belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.

Gambar 2.7
Grafik Rasio Murid-Guru SD, SLTP dan SLTA di Provinsi Banten
Tahun 2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2) **Kesehatan**

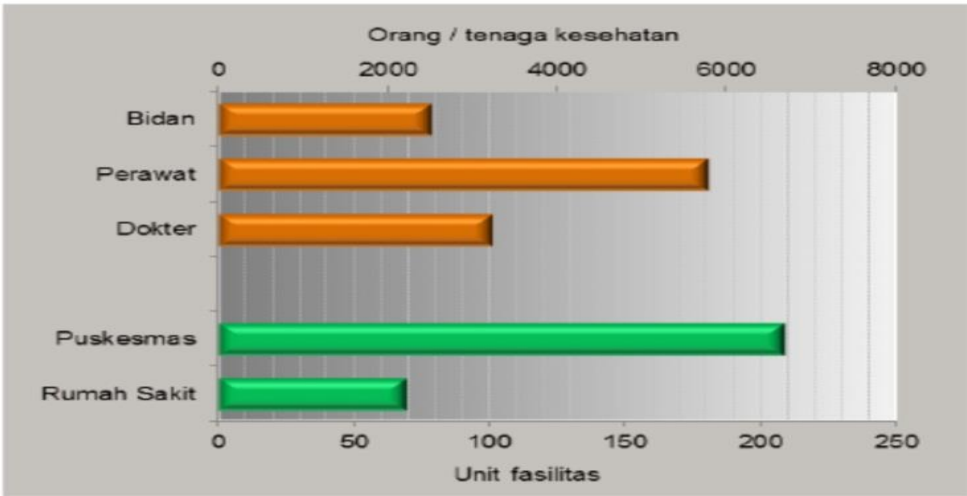
Capaian kinerja layanan kesehatan selama periode 2008-2010 ditandai dengan Indikator penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), jumlah tempat berobat dan tenaga kesehatan sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.7 dan Gambar 2.8.

Tabel 2.7
Statistik Kesehatan di Provinsi Banten
Tahun 2008-2010

NO	INDIKATOR KESEHATAN	2008	2009	2010
1	AKB (Per 100 Kelahiran)	37	36	34
2	AHH (Tahun)	64,60	64,75	64,90
3	Angka Kesakitan (%)	37,17	37,70	33,02
	TEMPAT BEROBAT			
1	Praktek Dokter (%)	38,10	39,30	37,54
2	Petugas Kesehatan (%)	20,10	23,58	20,26
3	Pengobatan Tradisional (%)	1,62	1,08	0,74
4	Lainnya (%)	1,82	1,94	2,64

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Gambar 2.8
Grafik Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten
Tahun 2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

3) **Pekerjaan Umum dan Perhubungan**

Layanan urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. Sebagai gambaran tentang moda transportasi darat, data panjang jalan nasional dan provinsi, jumlah kendaraan bermotor, dan angkutan kereta api pada

tahun 2009 sampai dengan 2010 sebagaimana termuat dalam Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2.8
Statistik Transportasi Darat di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010

Uraian	2009	2010
Panjang Jalan (km)		
- Jalan Negara	490,40	476,49
- Jalan Provinsi	889,01	770,09
Jumlah Kendaraan (unit)		
- Mobil Penumpang	63 365	69 909
- Mobil Barang	72 903	80 421
- Mobil Bus	189 097	219 535
- Sepeda Motor	2 027 977	2 451 466
Angkutan Kereta Api		
- Penumpang (orang)	4 555 933	5 508 704
- Barang (tribu on)	1,74	26,00

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi pada tahun 2011 semula panjang jalan provinsi 770,09 km berubah menjadi 852,89 km.

Disamping itu gambaran tentang kondisi infrastruktur sumber daya air dapat terlihat dari kondisi jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik sebesar 82,27% dan kondisi sedang 12,23% sedangkan dalam kondisi rusak 7,5% dari 13 Daerah Irigasi (DI) seluas 20.474 ha.

Intensitas Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar di Indonesia sepanjang periode 2008-2010 menunjukkan peningkatan dengan jumlah penerbangan, penumpang dan kargo baik domestik maupun internasional sebesar 153,83 ribu pesawat, 20,23 juta orang penumpang dan 302,08 ribu ton kargo.

Salah satu pelabuhan penyeberangan terbesar di Banten adalah Pelabuhan Merak yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga menjadi pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak sebanyak 27,11 ribu trip namun dibanding tahun

2009 yang berjumlah 27,61 ribu trip terjadi penurunan karena gangguan gelombang, perbaikan dermaga dan keterbatasan Kapal Ferry. Hal ini menyebabkan layanan penyeberangan terhambat, sehingga sering terjadi kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Merak.

4) Perumahan

Sebagai gambaran tentang kondisi perumahan masyarakat di Provinsi Banten terlihat sebagaimana data statistik Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Statistik Perumahan di Provinsi Banten
Tahun 2009-2010 (%)

Uraian	2009	2010
Rumahtangga dengan rumah milik sendiri	74,35	72,33
Rumahtangga dengan luas lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$	71,53	72,18
Rumahtangga dengan lantai rumah bukan tanah	90,17	93,11
Rumahtangga dengan atap rumah dari genteng/beton	87,54	85,60
Rumahtangga dengan dinding rumah dari tembok	80,06	82,25

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2011) bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak baru sebesar 22,12% terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 35,19%. Sedangkan target Nasional sebesar 68,87%.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar yang layak ditahun 2011 adalah sebesar 64,15% terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 84,72%. Sedangkan target nasional sebesar 62,41%.

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan ditahun 2011 adalah sebesar 9,41%, terhadap target RAD MDGs Provinsi Banten pada tahun 2015 adalah sebesar 12,7%. Sedangkan target nasional sebesar 8,26%.

5) Lingkungan Hidup

Sebagai gambaran, kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari).

Kerusakan habitat ekosistem relatif terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku

mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Produksi sampah perkotaan di Provinsi Banten sekitar 16.539 m³/hari atau sekitar 5.971.035 m³/tahun. Daerah penghasil sampah terbesar adalah Kabupaten Tangerang, yaitu sebesar 5.995 m³/hari, sedangkan produksi sampah di kota lainnya dibawah 4.000 m³/hari. Pengelolaan persampahan maupun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah belum cukup baik, hal ini ditandai dengan banyak dijumpainya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, seperti dibadan sungai dan di pinggir jalan.

Pengelolaan limbah B3 masih belum optimal, dimana hingga saat ini ditenggarai masih adanya sejumlah perusahaan yang memperjualbelikan limbah B3. Disamping itu, permasalahan terkait dengan rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan kekhawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah perbatasan.

Ancaman bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang yang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibuangan, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervat dan Kali Sabi.

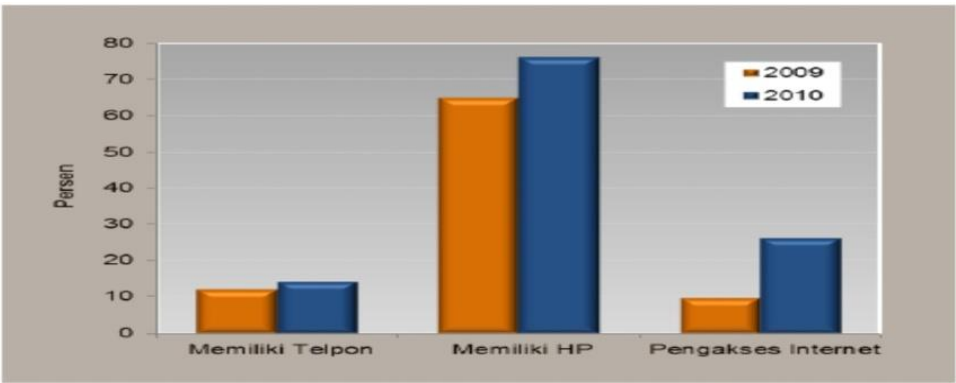
Ancaman gempa bumi yang terjadi selain gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur.

6) **Komunikasi dan Informatika**

Cakupan layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektronik telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah Banten. Berdasarkan data Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Angka Tahun 2010, terdapat surat kabar nasional yang berjumlah 39 media dan surat kabar lokal sebanyak 6 media. Untuk layanan operator seluler sebanyak 7 operator, penyiaran radio dan TV sebanyak 51 buah stasiun radio dan 11 penyiaran TV.

Akses masyarakat Banten terhadap sarana telekomunikasi dan internet pada periode 2009-2010 meningkat sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rumahtangga pemilik telepon rumah, HP dan pengakses internet masing-masing 14,25%, 76,28% dan 26,09%.

Gambar 2.9
Grafik Persentase Rumahtangga Pengguna Telepon dan Internet di Provinsi Banten Tahun 2009-2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

7) **Penataan Ruang**

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada masing-masing Kota di Provinsi Banten rata-rata masih kurang dari 30%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011

NO	KOTA	LUAS (HA)	PERSEN (%)
1	Serang	5.452.690	20,44
2	Cilegon	2.634.540	15,01
3	Tangerang	20.408.291,42	11,16
4	Tangerang Selatan	1.314.470	8,9

Sumber : RTRW Kota di Provinsi Banten

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan di tahun 2009 adalah sebesar 16,68%, sedangkan target MDGs pada Tahun 2015 adalah sebesar 26%. Rasio kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan di tahun 2010 adalah sebesar 11,8%, sedangkan pada tahun 2015 target MDGs adalah sebesar 16%. Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan Banten ditahun 2010 adalah 4,04% sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 6,30%.

Luas hutan negara di Provinsi Banten mengalami peningkatan antara tahun 2003 (78.649,61 ha) ke tahun 2005 (80.160,11 ha) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,96%. Dengan demikian, proporsi hutan negara terhadap luas semakin meningkat, yaitu dari 8,94% menjadi 9,11%. Hingga tahun 2004, sebaran hutan secara dominan terdapat di Kabupaten Pandeglang 38.994,64 ha (48,64%) dan Kabupaten Lebak 35.366,73 ha (44,12%), sedangkan sisanya di Kabupaten Serang 4.384,43 ha (5,46%). Bila ditinjau menurut jenisnya, terjadi pergeseran yang drastis antara komposisi hutan lindung dengan hutan produksi dalam kurun waktu 2003-2004, dimana hutan lindung dengan luasan 25.116,01 ha (31,93% terhadap luas hutan negara) pada tahun 2003 menjadi 7.894,11 ha (9,84%) pada tahun 2004 atau dengan laju penurunan sebesar 69,17% (berkurang 17.221,90 ha). Pergeseran tersebut, khususnya disebabkan karena pengalihan fungsi hutan lindung menjadi 'hutan produksi terbatas' yang terjadi pada hutan lindung di seluruh kabupaten tersebut di atas, khususnya di Kabupaten Pandeglang (yang juga merupakan wilayah dengan keberadaan hutan lindung terluas) dengan laju penurunan mencapai 82,98% (12.689,59 ha).

Kawasan lindung pada tahun 2009 seluas 223.930,34 ha atau 25,88% dari luas wilayah Provinsi Banten, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Kawasan Lindung di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAWASAN LINDUNG	LUAS (HA)
1	Hutan Konservasi	126.397,30
2	Hutan Lindung	9.471,39
3	TWA Perairan Laut Sangiang	720,00
4	Perairan Laut TNUK	44.337,00
5	Hutan Bakau di Luar Kawasan Hutan	918,67
6	Kawasan Ulayat Baduy/Cagar Budaya	5.136,58
7	Kawasan Rawan Bencana Alam	36.161,97
8	Kawasan Lindung Sekitar Hulu Air	787,43
Jumlah		223.930,34

Sumber : Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2009

Indikasi program untuk pemanfaatan ruang di Provinsi Banten selama jangka waktu 5 tahun berdasarkan program struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis provinsi, dan pengendalian ruang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Rencana Pemanfaatan Ruang di Provinsi Banten
Tahun 2012-2017

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
					5 Tahun ke - I					II
					2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)
I	STRUKTUR RUANG									
1	Pengembangan Sistem Perkotaan	1 PKN Tangerang	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dep. PU, Depdagri, Bappeda, Dinas Bina Marga dan tata Ruang						
		2 PKN Tangerang Selatan								
		3 PKN Serang								
		4 PKN Cilegon								
		5 PKW Pandeglang								
		6 PKW Rangkasbitung								
		7 PKWp Panimbang								
		8 PKWp Bayah								
		9 PKWp Maja								
		10 PKWp Balaraja								
		11 PKWp Teluk Naga								
		12 PKL Labuan								
		13 PKL Cibaliung								
		14 PKL Malingping								
		15 PKL Tigaraksa								
		16 PKL Kronjo								
		17 PKL Anyer								
		18 PKL Baros								
		19 PKL Kragilan								
2	Pengembangan Sistem Prasarana Utama		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dep. PU, Dephub, Dep. ESDM, PLN, Bappeda, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Pertambangan dan Energi						
	2.1 Pengembangan sistem jaringan transportasi darat									
	2.1.1 Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Jalan Nasional	1 JORR II (Jakarta Outer Ring Road II) : Kamal - Teluk Naga - Batu Ceper, Benda - Batu Ceper - Kunciran, Kunciran - Serpong, Serpong - Cinere, Cinere - Cimanggis, Cimanggis - Cibitung, Cibitung - Cilincing								
		2 Tangerang - Merak								
		3 Serpong - Tigaraksa - Balaraja								
		4 Balaraja - Teluk Naga - Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara)								
		5 Cilegon - Bojonegara								
		6 Jembatan Selat Sunda								
		7 Merak - Cilegon - Serang - Tangerang - Batas DKI Jakarta								
		8 Merak - Suralaya - Pulo Ampel Bojonegara - Cilegon								
		9 Labuan - Saketi - Pandeglang - Rangkasbitung - Cipanas - Batas Provinsi Jawa Barat								
		10 Bojonegara - Banten Lama - Tirtayasa - Kronjo - Mauk - Teluknaga - Bandara Soekarno Hatta								
		11 Merak - Cilegon - Ciwandan - Anyer - Canita - Labuan - Panimbang - Cigeulis - Cibaliung -								
		12 Muarabinuangun - Malingping - Simpang - Bayah - Cisulok - Batas Provinsi Jawa Barat								
		Merak - Bts.Kota Cilegon								
		13 Jln. Raya Merak (Cilegon)								
		14 Jln. Raya Cilegon (Cilegon)								
		15 Bts.Kota Cilegon - Bts.Kota Serang								
		16 Jln. Raya Serang (Cilegon)								
		17 Jln. Raya Cilegon (Serang)								
		18 Jln. Tirtayasa (Serang)								
		19 Jln. Maulana Yusuf (Serang)								
		20 Jln. Mayor Safel (Serang)								
		21 Bts.Kota Serang - Bts.Kota Tangerang								
		22 Jln. A. Yani (Serang)								
		23 Jln. Sudirman (Serang)								
		24 Jln. Raya Serang (Tangerang)								
		25 Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts.DKI)								
		26 Bts.Kota Cilegon - Pasauran								
		27 Jln. Raya Anyer (Cilegon)								
		28 Pasauran - Labuhan								
		29 Labuhan - Simp.Labuhan								
		30 Simp.Labuhan - Saketi								
		31 Saketi - Bts.Kota Pandeglang								
		32 Jln. Raya Labuan (Pandeglang)								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				2011	5 Tahun ke - I				II
				2012	2013	2014	2015		(2016 - 2020)
	33 Jln. Abdulrahim (Pandeglang)								
	34 Bts. Kota Pandeglang - Bts. Kota Rangkasbitung								
	35 Jln. Mayor Widagdo (Pandeglang)								
	36 Jln. Raya Rangkasbitung (Pandeglang)								
	37 Jln. Raya Pandeglang (Rangkasbitung)								
	38 Bts. Kota Rangkasbitung - Cigelung (Bts. Prov. Jawa Barat)								
	39 Jln. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)								
	40 Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung)								
	41 SP. Labuan - Cibaliung								
	42 Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangeun								
	43 Muara Binuangeun - Simpang								
	44 Simpang - Bayah								
	45 Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jawa Barat								
	46 Bts. Kota Serang - Bts. Kota Pandeglang								
	47 Jln. Yusuf Martadilaga (Serang)								
	48 Jln. TB. A. Katib (Serang)								
	49 Jln. Raya Pandeglang (Serang)								
	50 Jln. Raya Serang (Pandeglang)								
	51 Jln. A. Yani (Pandeglang)								
	52 Jln. Asnawi (Pandeglang)								
	53 Bts. DKI/Banten - Gandaria/Bts. Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor)								
2.1.2 Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif yang penetapannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku	Kragilan (Kabupaten Serang) - Warunggunung (Kabupaten Lebak) - Panimbang (Kabupaten Pandeglang) - Bandar Udara Banten Selatan								
2.1.3 Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Jalan Propinsi	1 Tangerang - Serpong - Batas Provinsi Jawa Barat								
	2 Bayah - Cikotok - Citorek - Majasari - Cigelung - Rangkasbitung - Kopo - Cisoka - Tigaraksa - Serpong								
	3 Pontang - Ciruas - Warung Gunung - Gunung Kencana - Malingping								
	4 Warung Gunung - Cipanas								
	5 Rangkasbitung - Citeras - Tigaraksa								
	6 Panimbang - Angsana - Munjul - Cikeusik - Muarabinuangeun								
	7 Panimbang - Citeureup - Banyuasih - Cimanggu - Cigeulis - Wanasalam - Malingping								
	8 Citeureup - Cibaliung - Cikeusik - Wanasalam - Malingping								
	9 Bayah - Ciligrang - Cibareno - Batas Provinsi Jawa Barat								
	10 Ciputat-Ciledug								
	11 Jl. Raya Jombang (Ciledug)								
	12 Jl. Raya Jombang (Ciputat)								
	13 Jl. Aria Putra (Ciputat)								
	14 Jl. H. Usman (Ciputat)								
	15 Tangerang-Serpong-Bts. Bogor								
	16 Jl. Raya By Pass (Tangerang)								
	17 Jl. Raya Serpong (Tangerang)								
	18 Simpang Bitung-Curug								
	19 Jl. Beringin Raya (Tangerang)								
	20 Jl. Raya Cipondoh								
	21 Jl. Raya Ciledug								
	22 Ciputat-Serpong								
	23 Jl. Pajajaran (Ciputat)								
	24 Jl. Puspiptek Raya (Ciputat)								
	25 Curug-Parung Panjang								
	26 Kronjo-Mauk								
	27 Mauk-Teluk Naga								
	28 Teluk Naga-Dadap								
	29 Cisauk-Jaha								
	30 Malangnengah-Tigaraksa								
	31 Karawaci-Legok								
	32 Pamulang Timur-Sp. Gablek								
	33 Sp. Gablek-Batas DKI								
	34 Pontang-Kronjo (Tanara-Kronjo)								
	35 Tigaraksa-Citeras								
	36 Serang-Cadasari								
	37 Jl. Tb. A. Khatib (Serang)								
	38 Jl. Yumaga (Serang)								
	39 Jl. Raya Pandeglang (Serang)								
	40 Cikande-Citeras								
	41 Pakupatan-Palima								
	42 Palima-Pasang Teneng								
	43 Terate-Banten Lama								
	44 Banten Lama-Pontang								
	45 Ciruas-Pontang								
	46 Sempu-Dukuh Kawung								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				5 Tahun ke - I					II
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)
	47 Jalan Parigi-Sukamanah								
	48 Kramatwatu-Tonjong								
	49 Jl. Trip Jamaksari (Serang)								
	50 Jl. Ayip Usman (Serang)								
	51 Lopang-Banten Lama								
	52 Jl. Kh. Abdul Fatah Hasan								
	53 Jl. Abdul Hadi (Serang)								
	54 Jl. Tb. Suwandi (Ling Selatan)								
	55 Jl. Letnan Jidun (Serang)								
	56 Simpang Taktakan-Gunung Sari								
	57 Gunung Sari-Mancak-Anyer								
	58 Kemang-Kaligandu								
	59 Jl. Veteran (Serang)								
	60 Jl. KH. Syam'un (Serang)								
	61 Ciruas-Petir-Warunggunung (Sorok)								
	62 Pontang-Kronjo (Pontang-Tanara)								
	63 Jl. Yasin Beji (Cilegon)								
	64 Cadasari-Pandeglang								
	65 Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang)								
	66 Jl. A. Yani (Pandeglang)								
	67 Jl. Raya Serang (Pandeglang)								
	68 Saketi-Simpang (Saketi-Picung)								
	69 Cibaliung-Sumur								
	70 Cigadung-Cipacung								
	71 Mengger-Mandalawangi-Caringin								
	72 Saketi-Ciandur								
	73 Jl. Jenderal A. Yani (Labuan)								
	74 Picung-Munjul								
	75 Munjul-Cikeusik								
	76 Munjul-Panimbang								
	77 Ciseukeut-Sobang-Tela								
	78 Saketi-Simpang (Picung-Simpang)								
	79 Bayah-Cikotok								
	80 Gunung Madur-Pulau Manuk								
	81 Citeras-Rangkasbitung								
	82 Jl. By Pass (Rangkasbitung)								
	83 Jl. Raya Cikande (Rangkasbitung)								
	84 Cikotok-Bts. Jabar								
	85 Cipanas-Warung Banten								
	86 Maja-Koleang								
	87 Ciruas-Petir-Wr. Gunung (Sorok-Wr. Gunung)								
	88 Wr. Gunung-Gunung Kencana								
	89 Gunung Kencana-Malingping								
	90 Gunung Kencana-Banjar Sari								
2.1.4 Perwujudan dan Pemantapan Terminal	1 Terminal Merak								
	2 Terminal Pakupatan								
	3 Terminal Poris Plawad								
	4 Terminal Bandara Soekarno Hatta								
	5 Terminal Kadubanen								
	6 Terminal Kaduagung								
	7 Terminal Jatiuwung								
	8 Terminal Agribisnis (Ciruas, Kabupaten Serang)								
2.1.5 Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Kereta Api	1 Stasiun Tonjong Baru - Pelabuhan Bojonegara								
	2 Tangerang - Bandara Soekarno Hatta								
	3 Serpong - Tangerang - Bandara Soekarno Hatta								
	4 Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung								
	5 Labuan - Saketi - Rangkasbitung								
	6 Saketi - Malingping - Bayah								
	7 Ciwandan - Anyer Kidul								
	8 Anyer Kidul - Labuan - Panimbang								
	9 Serpong - Citayam - Nambo - Ciakrang								
	10 Double track Jakarta - Kota Tangerang								
	11 Stasiun :								
	- Kawasan Merak								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				5 Tahun ke - I					II
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)
	- Kawasan Bojonegara								
	- Kawasan Bandara Soekarno Hatta								
	- Kawasan Bandar Udara Banten Selatan								
2.1.6 Pengembangan Jaringan Penyeberangan	1 Merak - Bakauheni								
	- Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Merak V								
	- Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Merak VI								
	2 Cituis/Tanjungkait/Tanjungpasir - Kepulauan Seribu								
	3 Karangantu - Pulau Tunda								
	4 Grenjang - Pulau Panjang								
	5 Sumur - Pulau Panellian								
	6 Muarabinuangun - Pulau Deli								
	7 Labuan - Pulau Sangiang								
	8 Merak - Kepulauan anak Gunung Krakatau								
2.2 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut									
2.2.1 Pengembangan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Bojonegara								
2.2.2 Pengembangan Pelabuhan Pengumpan	1 Pelabuhan Labuan								
	2 Pelabuhan Anyer								
	3 Pelabuhan Bayah								
	4 Pelabuhan Muarabinuangun								
	5 Pelabuhan Bojonegara Wadas								
2.2.3 Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Kubangsari								
2.2.4 Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1 Pelabuhan Ciwandan								
	2 Pelabuhan Cigading								
2.2.5 Pengembangan Terminal Khusus	1 Kabupaten Lebak								
	2 Kabupaten Pandeglang								
	3 Kabupaten Serang								
	4 Kawasan Reklamasi Teluk Naga Kabupaten Tangerang								
2.2.6 Pemantapan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Binuangun								
	2 Pelabuhan Labuan								
	3 Pelabuhan Carita								
	4 Pelabuhan Sukanegara								
	5 Pelabuhan Sidamukti								
	6 Pelabuhan Panimbang								
	7 Pelabuhan Citeureup								
	8 Pelabuhan Sumur								
	9 Pelabuhan Cikeusik								
	10 Pelabuhan Tamanjaya								
	11 Pelabuhan Karangantu								
	12 Pelabuhan Tanjungpasir								
	13 Pelabuhan Kronjo								
	14 Pelabuhan Cituis								
2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara									
2.3.1 Pemantapan Bandara Internasional	Soekarno - Hatta								
2.3.2 Perwujudan Bandara Khusus	1 Bandara Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang								
	2 Bandara Budiarto (pusat pendidikan penerbangan)								
	3 Bandara Gorda (khusus kepentingan militer)								
2.4 Pengembangan Angkutan Massal	Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung (CISEPARANG)								
3 Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya									
3.1 Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan	1 PLTU 1 Suralaya								
	2 PLTU 2 Labuan								
	3 PLTU 3 Lontar								
	4 SUTET 500 KV								
	5 SUTT 150 KV								
	6 PLTN Banten								
	7 PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten								
3.2 Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
3.2.1 Perwujudan dan Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air	1 Bendungan Karian								
	2 Bendungan Sindang Heuta								
	3 Bendungan Pasir Kopo								
	4 Bendungan Cidanau								
	5 Bendungan Cisdane								
	6 Bendung Ciliman								
	7 Bendungan Ciballung								
	8 Bendung Pamarayan								
	9 Bendung Ranca Sumur								
	10 Bendungan Pasar Baru								
	11 CAT Rawa Danau di Serang - Pandeglang								
	12 CAT Serang - Tangerang								
	13 CAT Labuhan								
	14 CAT Malimping								
	15 CAT Jakarta								
	16 Situ/Waduk/Danau/Rawa yang terdapat di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon								
3.2.2 Pengembangan dan Pemantapan Daerah Irigasi (DI)	1 DI Cicinta								
	2 DI Cibanten Atas								
	3 DI Cipari/Ciwuni								
	4 DI Cisangu								
	5 DI Cisangu Bawah								
	6 DI Ciwaka								
	7 DI Cikawa Bawah								
	8 DI Kedung Ingas								
	9 DI Cisata								
	10 DI Pasir Eunih								
	11 DI Cilemer								
	12 DI Cibinuangeun								
	13 DI Cikoncang								
	14 DI Cilanglahan I								
3.2.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Prasarana Situ/Waduk/Danau/Rawa	1 Kabupaten Lebak								
	2 Kabupaten Pandeglang								
	3 Kabupaten Serang								
	4 Kota Cilegon								
	5 Kabupaten Tangerang								
	6 Kota Tangerang Selatan								
	7 Kota Tangerang								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				2011	2012	2013	2014	2015	II (2016 - 2020)
3.2.4 Pengembangan Wilayah Sungai (WS)	1 WS Ciliman – Cibungur 2 WS Cibaliung – Cisawarna 3 WS Cidanau – Clujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum (lintas provinsi)								
3.3 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya									
3.3.1 TPA untuk persampahan	1 TPST Bojong Menteng Kabupaten Serang 2 TPST Ciangir Kabupaten Tangerang								
3.3.2 Pengelolaan Limbah Industri B3	Kota Cilegon								
II POLA RUANG									
1 Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Lindung		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. Kehutanan, Dep. Budpar, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan						
1. CA G. Tukang Gede	Kabupaten Serang								
2. CA Rawa Danau	Kabupaten Serang								
3. CA Pulau Dua	Kota Serang								
4. TWA Carita	Kabupaten Pandeglang								
5. TWA Pulau Sangiang	Kabupaten Serang								
6. TN Ujung Kulon	Kabupaten Pandeglang								
7. TN Halimun Salak	Kabupaten Lebak								
8. Taman Hutan Raya (TAHURA)	Kabupaten Pandeglang								
9. Hutan Lindung	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Cilegon								
10. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kota Tangerang 4 Kota Tangerang Selatan 5 Kabupaten Pandeglang 6 Kabupaten Lebak 7 Kota Cilegon								
11. Sempadan Pantai	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Cilegon								
12. Sempadan Sungai	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kota Tangerang 4 Kabupaten Pandeglang 5 Kabupaten Lebak								
13. Kawasan Rawan Bencana Alam	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak								
14. Kawasan Sekitar Mata Air	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Pandeglang 3 Kabupaten Lebak								
15. Kawasan Konservasi Cagar Budaya	1 Kawasan Masyarakat Adat Baduy, Kabupaten Lebak 2 Kawasan Banten Lama, Kota Serang								
2 Pengembangan Kawasan Budidaya		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. PU, Dep. Kehutanan, Dep. Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan						
1. Pengembangan Peruntukan Hutan Rakyat	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Pandeglang 3 Kabupaten Lebak 1 Kabupaten Serang (*)								
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian (*) Termasuk Lahan Pangan Berkelanjutan	2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang (*) 4 Kabupaten Pandeglang (*) 5 Kabupaten Lebak (*) 6 Kota Cilegon								
3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan	1 Kabupaten Serang 2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang 4 Kota Tangerang 5 Kota Tangerang Selatan 6 Kabupaten Pandeglang 7 Kabupaten Lebak 8 Kota Cilegon								
4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak 3 Kabupaten Serang 4 Kabupaten Tangerang 5 Kota Serang								
5. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak								
6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	1 Kabupaten Serang 2 Kabupaten Tangerang 3 Kabupaten Pandeglang 4 Kabupaten Lebak 5 Kota Tangerang 6 Kota Tangerang Selatan 7 Kota Cilegon 8 Kota Serang								
7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	1 Kabupaten Pandeglang 2 Kabupaten Lebak 3 Kota Serang 4 Kabupaten Serang 5 Kota Cilegon								
8. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	1 Kabupaten Serang 2 Kota Serang 3 Kabupaten Tangerang 4 Kota Tangerang 5 Kota Tangerang Selatan 6 Kabupaten Pandeglang 7 Kabupaten Lebak 8 Kota Cilegon								

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
				5 Tahun ke - I					II
				2011	2012	2013	2014	2015	(2016 - 2020)
9. Kawasan Bojonegara – Merak – Cilegon	Kabupaten Serang dan Kota Cilegon								
10. Kawasan andalan Laut Krakatau dan sekitarnya									
III PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau	Dep. terkait pengembangan kawasan strategis, Dinas/Instansi terkait pengembangan						
1. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional									
1.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	Pulau Deli sebagai Kawasan Pulau Kecil Terluar								
1.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Selat Sunda								
	2 Kawasan Jabodetabekpunjur								
	Taman Nasional Ujung Kulon								
1.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan									
2. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi									
2.1 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	1 Kawasan TNI AU Bandara Gorda di Kabupaten Serang								
	2 Kawasan TNI AD KOPASUS di Taktakan Kota Serang								
	3 Kawasan TNI AD komando pendidikan latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak								
	4 Kawasan TNI AL di Merak Kota Cilegon								
	5 Lapangan Terbang Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan								
2.2 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1 Kawasan Wisata Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang								
	2 Kawasan Malingping dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak								
	3 Kawasan Cibaliung dan Sekitarnya di Kabupaten Pandeglang								
	4 Kawasan Wisata Bayah dan Sekitarnya di Kabupaten Lebak								
	5 Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang								
	6 Kawasan Teluk Naga di Kabupaten Tangerang								
	7 Kawasan Kota Keherabatan Maja								
	8 Kawasan Strategis Ekonomi Bojonegara								
	9 Kawasan Strategis Ekonomi Krakatau Cilegon								
	10 Kawasan Kaki Selat Sunda								
	11 Kawasan Sport City								
	12 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)								
	13 Kawasan Banten Water Front City								
	14 Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan								
2.3 Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Sosial Budaya	1 Kawasan Situs Banten Lama, Kota Serang								
	2 Kawasan Masyarakat Adat Baduy, Kab. Lebak								
2.4 Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	1 Kawasan PLTU 1 Suralaya								
	2 Kawasan PLTU 2 Labuan								
	3 Kawasan PLTU 3 Lontar								
	4 Bendung Pamarayan								
	5 Bendung Ranca Sumur								
	6 Bendungan Karian								
	7 Bendungan Pasir Kopo								
	8 Bendungan Cilawang								
	9 Bendungan Tanjung								
	10 Bendungan Sindang Heula								
	11 Bendungan Krenceng								
	12 Bendung Ciliman								
	13 Puspipitek, Kota Tangerang Selatan								
	14 PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten								
	15 PLTN Kawasan Pesisir Pantai Utara Provinsi Banten								
2.5 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	1 Cagar Alam Rawa Danau di Kabupaten Serang								
	2 Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kabupaten Serang								
	3 Kawasan Akarsari (Gn. Aseupan, Gn. Karang, dan Gn. Pulosari) Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang								
	4 Kawasan Penyangga Bandara Soekarno-Hatta								

8) Tata Kelola Pemerintahan

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam RPJMN 2010-2014, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi terwujud dalam pemerintahan yang bersih, pelayanan publik berkualitas, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut guna membentuk birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat supaya hidup lebih aman, nyaman, tentram, rukun, damai, bersatu dan sejahtera.

Penerapan prinsip keterbukaan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini telah dibentuk infrastruktur Pelayanan Informasi Publik (PPID dan PPID Pembantu) dan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten yang telah berfungsi dalam memfasilitasi berbagai sengketa informasi.

Perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa instansi pemerintah secara elektronik (E-Procurement) yaitu Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Tanggal 20 Januari 2012 Nomor 999.05/KEP-Huk/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 999.05/KEP.1-Huk/2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Banten sebagai salah satu wujud E-Government. Dalam aspek akuntabilitas Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperlukan kerja keras khususnya untuk membenahi kelemahan penataan administrasi aset daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal, merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi

Banten dalam menerapkan efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan perizinan. Hasil kinerja sinergis dari setiap SKPD berdampak pada kondisi Banten yang kondusif, aman, tentram dan nyaman sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan dan meningkatkan nilai investasinya di Banten. Terkait dengan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Harmonisasi hubungan antar kelembagaan melalui sasaran penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD, tercermin dalam proses penyusunan produk hukum daerah melalui peraturan daerah, selama kurun waktu 2002-2012 telah diselesaikan sebanyak 41 peraturan daerah, baik yang bersifat usulan dari pemerintahan daerah maupun inisiatif DPRD. Rasio nota kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD mencapai 89,10%, sedangkan aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam anggaran pembangunan mencapai 87,98% dari tahun 2011.

Penataan peraturan daerah dilakukan melalui program peningkatan kesadaran dan pengembangan produk hukum melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi produk hukum pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan nilai capaian tahun 2011 sebesar 97,93%. Selain itu, rasio penegakan peraturan daerah dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda melalui capaian sebesar 99,71%. Dalam rangka penegakan peraturan daerah tersebut, telah dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS secara rutin.

Selama kurun tahun 2007-2011, terkait dengan pembatalan peraturan daerah telah dilakukan pencabutan dan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan oleh Kementerian Keuangan, melalui Surat Rekomendasi Nomor S-148/MK.7/2007 tanggal 16 Juli 2007, dan revisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Guna meningkatkan profesionalisme birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, pembuatan kartu pegawai elektronik (KPE) dan sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK). Target kedepan akan dikembangkan sistem kepegawaian secara online dan pelayanan kepegawaian satu pintu (one stop service).

Kondisi aparatur birokrasi Provinsi Banten semula berjumlah 2.958 orang (2007), meningkat menjadi 3.868 orang (2011). Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan didominasi lulusan S-1 (50,41%) SLTA (19, 59%), Diploma (16,64%), S-2 (12, 30%) sisanya SD, SLTP dan S-3. Pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari semula 124 pelanggaran (2007) menjadi 51 pelanggaran. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan pembinaan disiplin pegawai.

Selain itu, dalam rangka penanganan dan pencegahan korupsi, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan/aset daerah telah dilaksanakan melalui Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dengan indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan nilai capaian kinerja di tahun 2011 sebesar 79,78%. Hal ini perlu ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan palayanan publik yang bermutu dan akuntabel.

9) Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Struktur ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada Tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Struktur Ketenagakerjaan Penduduk di Provinsi Banten
Tahun 2010-2012

NO	KEGIATAN UTAMA	SAT	2010 (FEBRUARI)	2011 (AGUSTUS)	2012 (FEBRUARI)
1	Penduduk Usia >15 tahun	Orang	7.402.379	7.686.359	7.783.259
2	Angkatan Kerja	Orang	4.791.977	5.210.224	5.398.644
	a. Bekerja	Orang	4.113.360	4.529.660	4.818.967
	b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	Orang	678.617	680.564	579.677
3	Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.610.420	2.476.135	2.384.615
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %)	%	64.74	67,79	69.36
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %)	%	14,16	13,06	10.74

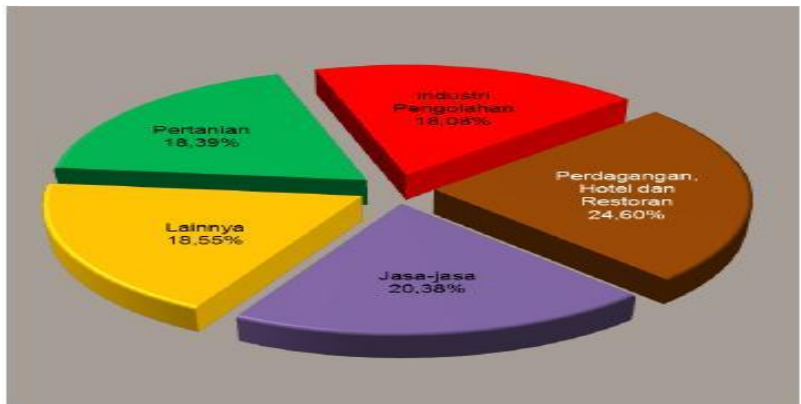
Sumber : Berita Resmi Statistik (7 Mei 2012)

Tabel 2.14
Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KABUPATEN/ KOTA	ANGKATAN KERJA	PENGGANGGURAN	TPT(%)	TPAK(%)
Kabupaten:					
1	Pandeglang	513.487	58.108	11.32	64.28
2	Lebak	549.378	66.471	12,10	63.60
3	Tangerang	1.416,780	204,358	14,42	69.46
4	Serang	657,679	87.433	13.29	64.74
Kota:					
5	Tangerang	945.334	121.818	12.89	70.31
6	Cilegon	185.874	24.426	13.14	70.00
7	Serang	274.594	38.015	13.84	68.60
8	Tangerang Selatan	667.099	79.935	11.98	69.64
Jumlah		5.210.224	680.564	13.06	67.79

Sumber: Berita Resmi Statistik (Agustus 2011)

Gambar 2.10
Grafik Komposisi Sektor Pekerjaan Usia Kerja Yang Bekerja
di Provinsi Banten Tahun 2010



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

10) Ketahanan Pangan

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang stok pangan 10 juta ton, maka ketahanan panganan menjadi salah satu isu strategis di Provinsi Banten. Sehubungan dengan layanan distribusi dan akses pangan masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten telah menyediakan 1 (satu) unit kendaraan warung pangan mobile sebagai antisipasi dalam menangani kerawanan pangan, selain itu masyarakat juga berperan aktif dengan dibentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Mengenai jumlah ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Banten pada bulan Februari 2012, dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Rekapitulasi Cadangan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2012

URAIAN	KETERSEDIAAN (TON)	PEMANFAATAN (TON)	KETERANGAN
Cadangan Beras Provinsi	200	-	Di simpan Bulog
Cadangan Beras Kab/Kota			Di simpan Bulog, dan telah disalurkan untuk bantuan masyarakat akibat banjir,nelayan yg tdk bisa melaut,angin puting beliung
a. Kab Serang	100	70	
b. Kab Pandeglang	100	50	
c. Kab Tangerang	100	60	
d. Kab Lebak	100	50	
e. Kota Serang	100	22,5	
f. Kota Cilegon	100	-	
g. Kota Tangerang			
h. Kota Tangerang Selatan			
Jumlah	800	252,5	
Cadangan Pangan Provinsi Dana APBD Tahun 2011			Bantuan nelayan Kota Serang, Kab Serang,Kab Pandeglang, Kab Lebak, Kab Tangerang.
a. Kerjasama dengan Bulog	124	5	
b. Gapoktan (10)	79	-	
Jumlah	203	5	
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota)			
a. Kab Tangerang	36	-	
b. Kota Cilegon	43	-	
JUMLAH	79	-	
CadanganPangan Masyarakat (APBD dan APBN 2011)			
a. Lumbung Pangan (30)	100	-	
b. LDPM (17)	89	-	
Jumlah	189	-	

Sumber. Badan Ketahanan Pangan 2012 (Februari)

Dari sisi penganekaragaman pangan sebagai bagian dari strategi pekuatan ketahanan pangan telah dilaksanakan berbagai program diantaranya penelitian komoditas keanekaragaman pangan diikuti dengan sosialisasinya termasuk lomba cipta menu pangan non beras, sebagai salah satu sumber energi dan protein. Adapun konsumsi pangan untuk kebutuhan energi dan protein dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Konsumsi Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	URAIAN	PERKEMBANGAN KONSUMSI PER KAPITA PER HARI					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Energi (kkal/kap/hari)	1996	1927	2015	2038	1958	1957
2	Protein gram/kap/hari)	55.27	53.66	57.65	57.43	59.17	59.98
Skor PPH		79.1	74.9	82.8	81.9	78.8	80.6

Sumber: Neraca Bahan Makanan Provinsi Banten 2011

Tingkat kerawanan pangan secara umum, Banten masuk dalam kategori 2, yaitu cukup rawan untuk ketersediaan pangan, tetapi berdasarkan indeks komposit penyerapan pangan secara keseluruhan termasuk agak tahan, dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Tingkat Kerawanan Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	INDEKS KOMPOSIT GABUNGAN	KETERANGAN
1	Kab.Pandeglang	4,2	Agak tahan
2	Kab. Lebak	4,4	Agak tahan
3	Kab.Serang	4,3	Agak tahan
4	Kab.Tangerang	3,9	Agak tahan
5	Kota Tangerang	3,5	Agak tahan
6	Kota Cilegon	3,5	Agak tahan
7	Kota Serang	4,0	Agak tahan
8	Kota Tangerang Selatan	3,6	Agak tahan

Sumber: Badan Ketahanan Pangan 2012

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi yang diberikan (3% terhadap produksi nasional) dan menduduki peringkat ke 9 nasional pada tahun 2010. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Tanaman pangan dan palawija merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dan berkembang dengan baik, adapun luas lahan sawah di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Luas Lahan Sawah di Provinsi Banten
Tahun 2009

NO	KAB/KOTA	TEKNIS	$\frac{1}{2}$ TEKNIS	SEDERHANA	DESA	TADAH HUJAN	LAINNYA	JUMLAH
1	Kab.Pandeglang	2.853	5.289	7.575	8.964	30.058	0	54.739
2	Kab. Lebak	4.124	2.365	4.708	11.083	22.503	56	44.839
3	Kab.Serang	22.861	3.021	937	0	13.796	13	40.6284
4	Kab.Tangerang	14.801	6.177	3.578	6.823	14.164	160	45.685
5	Kota Tangerang	534	122	0	0	417	0	1.073
6	Kota Cilegon	115	0	107	167	1.744	0	2.133
7	Kota Serang	3.73	579	284	325	3.403	0	8.321
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	12	53	47	0	112
Jumlah		49.018	17.553	17.201	27.415	86.114	229	197.53

Sumber: BPS Banten 2009

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan di Provinsi Banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi pada tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KAB/KOTA	PADI	JAGUNG	KEDELAJ	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG HIJAU
1	Kab.Pandeglang	596.796	1.642	4.043	1.822	964	1.304	452
2	Kab. Lebak	480.483	823	763	1.429	654	526	85
3	Kab.Serang	392.703	150	-	408	104	160	-
4	Kab.Tangerang	381.228	573	130	2.008	848	3.938	252
5	Kota Tangerang	6.671	-	-	5	4	-	-
6	Kota Cilegon	13.918	23	-	66	18	2.54	33
7	Kota Serang	76.082	493	119	391	154	2.267	252
8	Kota Tangsel	1.444	125	35	170	92	180	-
Jumlah		1.949.714	3.828	5.095	6.295	2.839	10.916	1.075

Sumber: BPS Banten 2011

Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kabupaten Tangerang dan Kota Serang, dan Obat-obatan Herbal. Selanjutnya mengenai data produksi buah, bunga dan obat-obatan pada Tahun 2011 sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Produksi Buah, Bunga dan Obat-obatan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
I. Buah-buahan(Ton)			
1	Melon	85,90	Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon
2	Pisang	5.837.824	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
3	Jeruk	4.062.937	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Mangga	1.306.043	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang dan Kota Serang
5	Nenas	1.406.438	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
6	Manggis dan durian	493.946	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Buah lainnya	2.504.611	
	Jumlah	15.620.389	
II. Bunga (Batang)			
	Anggrek	2.189.988	Kota Tangerang selatan
	phytodendrun	899.961	Kota Tangerang selatan
	Bunga lainnya	1.365.086	Kota Tangerang selatan, Kota Serang, Kab. Serang
	Jumlah	4.455.035	
III. Obat-obatan(Kg)			
	Non rimpang	67.026.287	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Rimpang	355.297.255	Kab. Lebak, Pandeglang, Kab. Serang
	Jumlah	422.305.542	

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Produksi sayur-sayuran menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar pada tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Produksi Sayuran di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PRODUKSI	SENTRA PRODUKSI
1	Jamur	116.701 ton	Kab. Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Tangerang
2	Petai	9.714 ton	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
3	Kacang panjang	20.930	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang
4	Cabe besar	4.638	Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional. Produksi dan sentra produksi peternakan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Produksi dan Sentra Peternakan di Provinsi Banten
Tahun 2011

NO	KOMODITAS	PERINGKAT (NASIONAL)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Sapi	4	20.300	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
2	Kerbau	6	3.700	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang
3	Ayam Ras	5	86.100	Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak
4	Telur	8	41.600	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2011

Gula aren, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, dan coklat merupakan tujuh komoditas andalan perkebunan dengan luas lahan perkebunan rakyat sebesar 173.589 ha, perkebunan besar swasta 6.018 ha, dan PTP seluas 9.578 ha. Selanjutnya mengenai data luas tanam, produksi dan daerah penyebaran komoditas unggulan perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Luasan, Produksi dan Daerah Sebaran Komoditas Perkebunan
di Provinsi Banten Tahun 2010

NO	KOMODITAS	LUASAN (HA)	PRODUKSI (TON)	DAERAH PERSEBARAN
1	Kelapa	100.058,65	55.541,00	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang
2	Karet	26.492,93	12.547,40	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
3	Kelapa Sawit	18.462,47	25.865,04	Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
4	Cengkeh	15.602,40	7.554,5	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang
5	Kopi	9.526,00	2.216,70	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, Kota Serang
6	Kakao	7.248,99	2.107,00	Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang
7	Aren	2.959,85	1,706,67	Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang

Sumber: Statistik Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011

Taman Hutan Raya merupakan salah satu kebanggaan Provinsi Banten, terletak di Kabupaten Pandeglang. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan konservasi dan agrowisata.

Pemberdayaaan di kawasan ini dilaksanakan dengan pembinaan masyarakat desa disekitar hutan dengan mengembangkan hasil hutan non kayu seperti jamur dan madu.

Sebagai gambaran tentang kondisi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten dapat dilihat dari potensi kawasan pesisir dengan garis pantai sepanjang 519 km.

Upaya pengembangan kawasan pantai terutama untukwisata bahari, wisata pantai, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industry pengolahan hasil kelautan. Pengembangan kawasan perikanan baik tangkap, budidaya maupun bahari dilaksanakan dengan pendekatan minapolitan, komoditas utama yang dikembangkan adalah rumput laut, ikan bandeng dan kekerangan. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan tangkap dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Produksi Perikanan di Provinsi Banten
Tahun 2010

NO	KOMODITAS	PRODUKSI (TON)
Perikanan Tangkap		
1	Kerapu	722
2	Manyung	1.369
3	Kakap	1.031
4	Kurisi	2.043
5	Cucut	1.398
6	Selar	2.136
7	Kue	1.158
8	Teri	2.753
9	Tenggiri	2.527
10	Tongkol	26.851
11	Jenis lainnya	21.863
Jumlah		63.150
Perikanan Budidaya		
1	Rumput Laut dan Ikan Bandeng	10.487
2	Udang Windu	44.187
3	Gurame	29.058
4	Ikan Patin	22.627
5	Jenis lainnya	359
Jumlah		106.000

Sumber: Statistik Perikanan Tahun 2011

Eksport produk hasil perikanan merupakan salah satu primadona andalan kelautan dan perikanan, capaian eksport pada tahun ini sebesar 435.642 kg dengan tujuan negara Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Ikan hias juga menjadi salah satu andalan eksport Provinsi Banten.

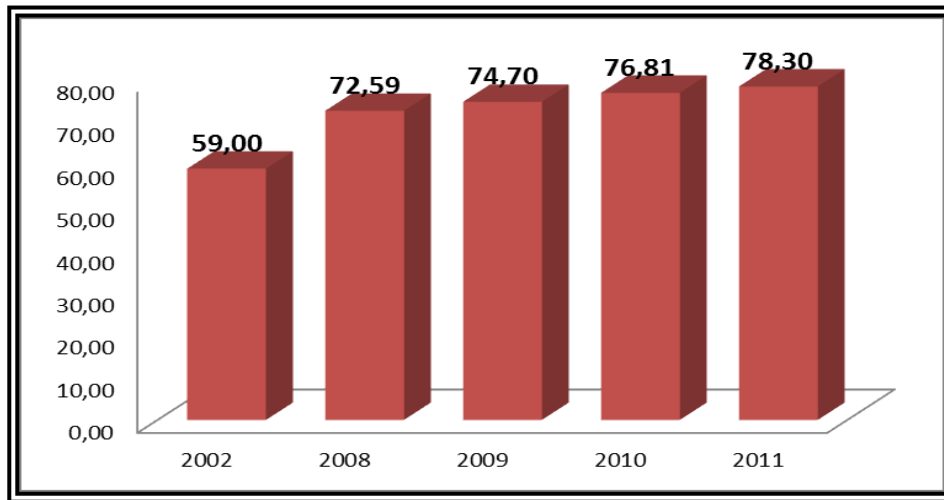
2) Energi dan Sumber Daya Mineral

Peranan sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Banten dari tahun ke tahun cenderung stagnan. Hal ini setidaknya dapat dikonfirmasi oleh perkembangan jumlah perusahaan/usaha penggalian di Banten selama periode 2007- 2009 yang cenderung berfluktuasi. Meskipun demikian, jumlah pekerja pada periode yang sama meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hanya saja, balas jasa per tenaga kerja setelah sempat naik dari 15,51 juta rupiah menjadi 16,68 juta rupiah pada tahun 2008, pada tahun 2009 akhirnya turun menjadi 13,56 juta rupiah per pekerja.

Sebaliknya, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiganya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Sampai tahun 2011 rasio elektrifikasi di Provinsi Banten mencapai 78,93%, yang berarti masih berada diatas rasio elektrifikasi Nasional maupun rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat. Rata-rata rasio elektrifikasi Nasional 72,95%, serta rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 70.72 %. Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten
Tahun 2002-2011 (%)



Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

3) Industri dan Perdagangan

Sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang setiap tahun selalu mendominasi perekonomian Banten. Hanya saja, jumlah perusahaan Industri Besar dan Sedang (IBS) di Banten sepanjang periode 2007-2009 justru mengalami penurunan hingga menjadi 1.695 unit. Penyerapan tenaga kerja juga menurun dari 0,49 juta orang pada tahun 2007 menjadi 0,47 juta orang di tahun 2009. Sebaliknya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diciptakan terus meningkat hingga menjadi 79,49 triliun rupiah pada tahun 2009. Akibatnya, NTB per tenaga kerja meningkat dari 123 juta rupiah menjadi 168 juta rupiah pada tahun 2009.

Secara spasial, IBS Banten terkonsentrasi antara lain di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan teknologi produksi kebanyakan padat tenaga kerja. Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang cenderung sebagai daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB untuk ke empat kabupaten/kota tersebut mencapai 92,98%, 93,50% dan 95,70%. Sedangkan perbedaan teknologi produksi antara IBS di kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja, dengan tingkat produktivitas tenaga kerja IBS padat modal lebih tinggi

dibanding IBS padat tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja untuk Kabupaten Tangerang; Kota Tangerang; Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing sebesar 100,50 juta rupiah; 152,52 juta rupiah; 254,72 juta rupiah dan 696,88 juta rupiah per tenaga kerja.

Menurunnya pertumbuhan ekspor yang lebih besar dari pada impor menyebabkan defisit perdagangan Banten terhadap luar negeri semakin membesar dan mencapai sekitar USD 1,25 miliar. Menurunnya ekspor disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor komoditas utama Banten seperti ekspor kimia dasar, besi/baja, tekstil, kertas dan kayu/gabus. Penurunan ekspor tersebut disebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi dunia terutama negara mitra dagang Banten seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Cina mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang memicu menurunnya permintaan barang dari Banten. Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk pada tahun 2012 khususnya permintaan barang dari negara-negara Eropa. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang dan USA diperkirakan telah mulai pulih pada tahun 2012.

Tabel 2.25
Perkembangan Ekspor dan Impor di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011

URAIAN		2010				2011			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
Ekspor	Nilai (US Ribu)	1,712,109	1,918,230	1,854,871	2,254,436	2,205,904	2,461,159	2,485,908	1,520,414
	Volume (Ribu Ton)	890	886	925	1,211	987	957	991	551
Impor	Nilai (US Ribu)	3,884,236	3,777,695	3,483,130	4,713,266	4,585,147	5,063,459	5,257,994	3,867,507
	Volume (Ribu Ton)	2,499	2,622	2,715	3,475	3,475	364	3,450	2,019

Sumber: Bank Indonesia 2012

Nilai ekspor Banten pada triwulan IV tahun 2011 masih mengalami peningkatan, tetapi berdasarkan volumenya telah mengalami penurunan yang signifikan pada periode laporan. Akibatnya pertumbuhan ekspor Banten kian melambat. Di sisi lain, nilai impornya secara bulanan semakin meningkat dan pertumbuhannya lebih tinggi dari pada ekspor Banten. Dampaknya, defisit transaksi perdagangan Banten dengan luar negeri semakin

membesar dan mencapai angka sekitar USD 1,25 miliar pada bulan Desember 2011 saja, tetapi jika dikumulatifkan akan mencapai lebih dari USD 7,5 miliar.

Pertumbuhan ekspor Banten pada akhir tahun 2011 ini mendekati posisi tahun 2009 sebagai dampak krisis global sejak tahun 2008. Kondisi ini diperkirakan dapat berulang karena krisis global mulai kembali berkejolak di akhir tahun 2010 yang dampaknya akan mulai dirasakan 1 tahun setelah krisis tersebut dimulai, seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya-upaya strategis perlu dilakukan sejak dari perencanaan bahan baku hingga target pasar oleh industri di wilayah Banten. Namun langkah ini akan sulit dilakukan tanpa dukungan pihak pemerintah, kestabilan sistem keuangan dan iklim yang kondusif. Kejadian banyaknya perusahaan tekstil dan kimia dasar di Banten yang menutup usahanya pada tahun 2009 perlu dicermati agar tidak berulang pada tahun 2011 hingga di tahun mendatang. Perusahaan yang banyak menampung tenaga kerja di Banten antara lain pabrik tekstil, alas kaki dan industri makanan. Saat ini, dari grafik beberapa komoditas ekspor terlihat adanya penurunan pertumbuhan ekspor pada industri pengolah kayu dan gabus, tekstil, besi/baja dan produk kimia dasar. Ekspor industri mineral tidak mengandung logam termasuk salah satu industri yang masih meningkat eksportnya.

Ekspor luar negeri industri besi/baja Banten menurun lebih disebabkan seiring menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas tersebut cenderung menurun dan meningkatnya harga minyak dunia yang menyebabkan biaya produksi semakin meningkat dan berdampak pada penurunan permintaan. Di sisi lain, penjualan di dalam negeri tetap memiliki prospek yang cerah seiring rencana pemerintah dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang banyak membutuhkan produk besi baja terutama pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan konstruksi lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, salah satu industri terbesar baja nasional di Banten terus melakukan ekspansi proyek pembangunan pabrik *blast furnace* yang akan segera direalisasikan

setelah mendapat pembiayaan dari salah satu grup besar perbankan besar dunia pada tahun 2012. Selain itu, pembangunan pabrik baja baru yang akan berpatungan dengan perusahaan dari Korea diperkirakan akan menyerap 100.000 tenaga kerja pada tahun 2013. Pabrik baja tersebut akan memproduksi 3 juta ton slab per tahun dan plat baja sebanyak 1,5 juta ton per tahun untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sisanya untuk kebutuhan produksi pabrik baja patungan itu sendiri di Banten. Kapasitas produksi pada tahun 2011 diperkirakan akan meningkat di akhir tahun 2011 setelah beberapa proyek strategis terkait finalisasi revitalisasi fasilitas produksi *Hot Strip Mill* (HSM) yang telah selesai pada bulan Mei 2011. Peningkatan produksi diperkirakan menjadi 2,4 juta ton per tahun dari sebelumnya hanya 2 juta ton per tahun.

4) Pariwisata

Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Pada tahun 2010 di Banten terdapat 228 usaha akomodasi dengan 6.167 kamar dan 9.801 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 39 unit diantaranya merupakan hotel berbintang dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 41,69%, lebih tinggi dibanding hotel non bintang yang hanya 26,18%.

Jumlah tamu yang menginap di hotel pada tahun 2010 mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Tabel 2.26
Statistik Perhotelan di Provinsi Banten
Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Akomodasi (unit)			
- Hotel Berbintang	37	37	39
- Hotel Non Bintang	189	178	189
- Total	226	215	228
Jumlah Kamar (unit)			
- Hotel Berbintang	2 641	2 775	2 765
- Hotel Non Bintang	3 219	3 014	3 402
- Total	5 860	5 789	6 167
Jumlah Tempat Tidur (unit)			
- Hotel Berbintang	4 248	4 184	4 208
- Hotel Non Bintang	5 722	4 828	5 593
- Total	9 970	9 012	9 801
Tingkat Hunian Kamar (persen)			
- Hotel Berbintang	46,89	42,07	41,69
- Hotel Non Bintang	33,13	30,5	26,18
- Total	39,33	36,05	32,84

Sumber: Banten Dalam Angka, BPS 2011

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Sebulan
Menurut Kelompok Barang di Provinsi Banten Tahun 2010-2011 (Rp)

NO	URAIAN	KOTA		DESA		KOTA + DESA	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT (Jumlah makanan)	338.137	361.733	234.516	262.388	296.896	328.623
2	Total Pengeluaran RT (Non makanan)	470.739	460.829	160.440	170.402	347.242	365.364
Jumlah		808.876	822.562	394.956	436.790	644.138	693.987

Sumber : Banten Dalam Angka, BPS 2011

2) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Selain itu, NTP biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Pencapaian NTP Banten tahun 2011 didapat angka rata-rata 106,54%, dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28
Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2011

SUB SEKTOR	2010			2011		
	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
Tanaman Pangan	128,31	128,21	100,07	140,97	134,30	104,96
Tanaman Hortikultura	134,25	126,68	105,98	144,48	132,56	108,99
Tanaman Perkebunan Rakyat	129,50	126,66	102,24	136,20	132,28	102,97
Peternakan	131,12	124,04	105,71	131,94	129,44	101,94
Perikanan	125,94	129,94	96,93	132,16	135,37	97,63
Gabungan	129,81	127,44	101,86	143,96	135,12	106,54

Keterangan : It = Indeks Yang Diterima
Ib = Indeks Yang Dibayar
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Banten 2012

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.

1) Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Pada tahun 2011, tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi sepanjang **852,89** km dalam kondisi mantap (baik dan cukup) sebesar 64.15% (547,1 km) dan

kondisi rusak 35,87% (305,79 km). Dengan tingkat kemantapan sebesar 64.15% tersebut, 35,87% dari panjang jaringan jalan provinsi berada pada kondisi rusak. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan provinsi sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil. Rendahnya tingkat kemantapan jalan ini juga disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh jaringan jalan di Banten dengan baik termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Banten.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Type Permukaan,
Kondisi dan Kategori Jalan di Provinsi Banten Tahun 2011

URAIAN	TINGKATAN JALAN	
	JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI
Kondisi Permukaan :		
- Aspal	476,49	758,91
- Berbatu	-	11,18
- Tanah	-	-
Kondisi Jalan :		
- Baik	440,89	335,64
- Cukup	-	211,46
- Rusak	35,60	305,79
- Sangat Rusak	-	-
Jumlah/ Total	476,49	852,89

Sumber: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2011

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda transportasi laut, di dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transporasi di Provinsi Banten.

2) Listrik dan Energi

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan

rumah tangga, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten. Tingkat efisiensi distribusi listrik PLN di Banten semakin membaik, karena persentase energi listrik yang susut selama proses distribusi mengalami penurunan dari 7,70% pada tahun 2009 menjadi 6,34% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2010 mencapai 16,29 juta MWh, dengan lebih dari dua per tiganya dibeli oleh pelanggan sektor industri. Pelanggan rumahtangga meskipun jumlahnya jauh lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sekitar seperlima dari total energi listrik yang terjual.

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

3) Hotel dan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2010 kunjungan wisatawan mencapai 1,15 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,05 juta orang dan 1,10 juta wisatawan nusantara. Dilihat dari komposisinya, hampir semua wisatawan mancanegara menginap di hotel berbintang, yaitu dengan persentase mencapai 98,99%. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang persentasenya hanya 43,80%.

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada

tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

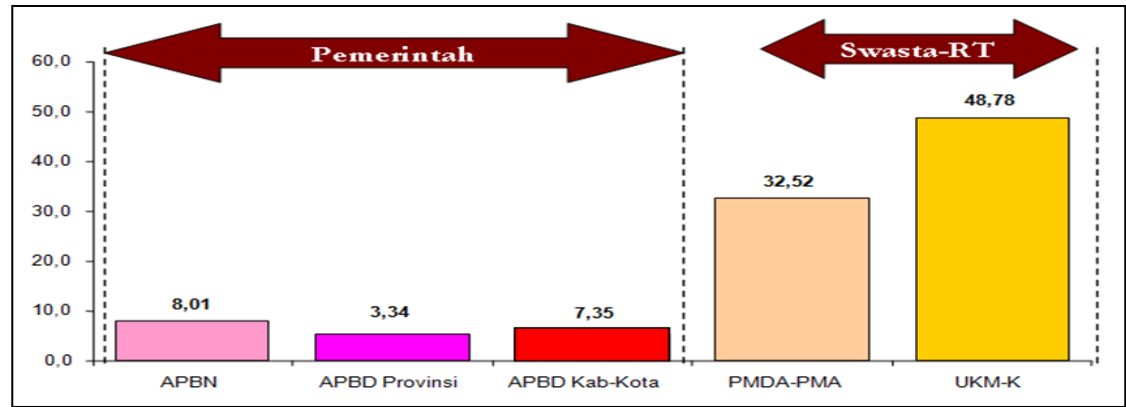
Tabel 2.30
Perkembangan dan Peringkat Investasi di Provinsi Banten
Tahun 2006-2011

Tahun	PMDN		PMA		Total Investasi PMA & PMDN Investasi (dalam rupiah)
	Proyek	Investasi (dalam milyar rupiah)	Proyek	Investasi (dalam US\$. Juta)	
2006	19	3.815,2	84	508,2	4.679.255.200.000
2007	22	1.068,7	78	708,6	7.825.050.000.000
2008	31	1.989,1	99	477,8	6.788.306.105.417
2009	23	4.381,7	92	1.412,0	19.099.114.628.798
2010	76	5.852,5	280	1.544,2	19.710.000.000.000
2011	32	5.979,4	71	1.021,6	15.174.362.066.230

Sumber: Data Perkembangan Penanaman Modal Edisi Desember 2011, BKPM RI
Catatan : (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketetapan BI pada masa tahun laporan)

Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%. Perkembangan struktur investasi dapat dilihat pada Gambar 2.12 dibawah ini.

Gambar 2.12
Grafik Struktur Investasi di Provinsi Banten



Sumber : Analisis I-O, BPS Banten – 2000

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

Penduduk merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan dewasa ini. Jumlah penduduk yang besar apalagi dengan komposisi dan distribusi yang lebih merata, dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan apabila berkualitas rendah. Karena itu, proses pembangunan yang dilakukan selain diarahkan

dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, harus pula mencakup upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan serta menyeimbangkan komposisi dan distribusi penduduk.

Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Banten sudah mencapai 10,63 juta orang. Penduduk laki-laki berjumlah 5,44 juta orang, lebih banyak dibanding penduduk perempuan yang hanya 5,19 juta orang. Dengan demikian, rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Banten pada tahun 2010 sekitar 101,5 atau terdapat 1.015 penduduk laki-laki diantara 1.000 penduduk perempuan.

Dibanding tahun 2000, penduduk Banten tumbuh sangat pesat yaitu rata-rata mencapai 2,78% per tahun. Padahal, penduduk Indonesia pada periode yang sama hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% per tahun. Akibatnya, persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi 4,48% pada tahun 2010. Disamping itu, pada tahun 2010 Banten juga berhasil menggeser DKI Jakarta sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, setelah Jawa Barat (18,12%), Jawa Timur (15,77%), Jawa Tengah (13,63%) dan Sumatera Utara (5,46%).

Ketersediaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor daya saing daerah yang menentukan dalam rangka menarik investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar sekitar 2,35 juta orang tenaga kerja di Provinsi Banten bekerja antara 35 sampai 49 jam per minggu dan berdomisili di wilayah Tangerang, Serang dan Cilegon, yang terkenal sebagai pusat bisnis dan industri. Kedua sektor tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja masing-masing sebesar 26,18% dan 22,77%. Sementara itu, Sektor Pertanian berada pada posisi ketiga dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dengan serapan sebesar 20,12% dari keseluruhan tenaga kerja, dan terlihat mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.

Setiap tahun selama periode 2009-2011, secara rata-rata dua dari tiga penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) di Banten

memasuki pasar kerja. Hal ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 dimana jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa dan yang bekerja sebesar 4.153.681 jiwa sehingga TPAK adalah sebesar 65,34% dan angka tingkat ketergantungan adalah sebesar 34,66%.

Jumlah angkatan kerja sendiri cenderung bertambah, dari 4,36 juta orang pada tahun 2009 menjadi 5,16 juta orang pada Februari 2011. Persentase penduduk usia kerja yang bekerja dari tahun 2009 sampai Februari 2011 terus meningkat dari 85,03% menjadi 86,50%. Berarti, tingkat kesempatan kerja di Banten terus meningkat. Akibatnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga menjadi 13,50% pada february 2011. Meskipun demikian, angka pengangguran ini masih tetap tertinggi di Indonesia karena TPT provinsi lainnya berkisar antara 2,67% (Nusa Tenggara Timur) dan 10,83% (DKI Jakarta).

Berdasarkan data pendidikan angkatan kerja menurut kategori penduduk sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 total jumlah angkatan kerja sebesar 4.854.184 jiwa didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 2.035.415 jiwa atau 41,93%. Diikuti dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA masing masing sebesar 930.491 jiwa (19,17%) dan 1.432.985 jiwa (20,59%). Sementara tingkat D1 sampai dengan S1,S2, dan S3 hanya berjumlah 455.293 jiwa (18,31). Jumlah angkatan kerja yang terserap berdasarkan pendidikan sebesar 4.153.681 jiwa yang didominasi oleh pendidikan SD kebawah sebesar 1.708.861 jiwa (41,14%) dan pendidikan SLTA sebesar 1.253.488 (30,18%) serta pendidikan SLTP sebesar 759.044 (18,7%), sedangkan yang berpendidikan Perguruan Tinggi D1 sampai dengan S1,S2 dan S3 sebesar 432.288 (10,41%). Dengan demikian jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 700.503 jiwa yang sebagian besar di dominasi oleh tingkat pendidikan SD sebesar 326.554 jiwa (46,62%), pendidikan SLTP sebesar 171.447 jiwa (24,47%) dan SLTA sebesar 179.497 (25,6%). Sementara yang berpendidikan tinggi (D1 sampai dengan S1,S2 dan S30 tinggal 23.005 (3,28%).

Tingginya angka pengangguran Banten bila diamati secara spasial sepertinya berkaitan erat dengan fenomena migrasi penduduk. Terdapat tiga kabupaten/kota dengan TPT di bawah angka pengangguran Banten. Diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang merupakan daerah perdesaan dimana perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, sehingga bukan menjadi daerah tujuan migrasi. Kemudian Kota Tangerang Selatan sebagai daerah termaju di Banten yang perekonomian didominasi oleh sektor ekonomi modern, karena itu relatif kurang menarik untuk menjadi daerah tujuan migrasi dibanding wilayah Tangerang lainnya. Sedangkan lima kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka pengangguran Banten merupakan daerah tujuan migrasi dengan berbagai sebab, antara lain adalah daerah dengan sektor perindustrian yang sangat dominan, ibukota Provinsi Banten dan adanya disparitas tingkat upah.

Upah minimum Provinsi (UMP) di Banten selama periode 2008-2010 secara nominal terus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, UMP riil (dibanding laju inflasi) selama periode tersebut sesungguhnya cenderung mengalami penurunan. UMP Banten sendiri pada tahun 2010 mencapai 955 ribu rupiah, lebih tinggi dibanding rata-rata UMP Nasional yang hanya 908 ribu rupiah.

2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis di

bawah koordinasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Sampai dengan saat ini Pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) bidang SPM, yaitu:

- 1) SPM Bidang Perumahan;
- 2) SPM Bidang Sosial;
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- 6) SPM Bidang Ketahanan pangan;
- 7) SPM Bidang Kesenian;
- 8) SPM Bidang Perhubungan;
- 9) SPM Bidang Penanaman Modal;
- 10) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- 11) SPM Bidang Kesehatan;
- 12) SPM Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera;
- 13) SPM Bidang Pendidikan;
- 14) SPM Bidang Pekerjaan Umum;
- 15) SPM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah provinsi meliputi 9 (sembilan) bidang SPM yakni Perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait

dengan SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025);
 - b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025);
 - c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% pada tahun 2025).
- 2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008)
 - a. Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - b. Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial, untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015);
 - c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
 - d. Persentase panti sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015);
 - e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015);
 - f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015).
- 3) SPM Bidang Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008)

- a. Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70% pada tahun 2013);
 - b. Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan informasikan mutu udara ambiennya (100% pada tahun 2013);
 - c. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (100% pada tahun 2013).
- 4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010)
- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (100% pada tahun 2014);
 - b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% pada tahun 2014);
 - c. Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% pada tahun 2014);
 - e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% pada tahun 2014);
 - f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50% pada tahun 2014);

- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% pada tahun 2014);
 - h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% pada tahun 2014).
- 5) SPM Bidang Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.15/Men/X/2010)
- a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (50% pada tahun 2016);
 - b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (60% pada tahun 2016);
 - c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60% pada tahun 2016).
- 6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010)
- a. Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015);
 - b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015);
 - c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80% pada tahun 2015);
 - d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada tahun 2015).
- 7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010)
- a. Cakupan kajian seni (50% pada tahun 2014);
 - b. Cakupan fasilitas seni (30% pada tahun 2014);
 - c. Cakupan gelar seni (75% pada tahun 2014);
 - d. Cakupan misi kesenian (100% pada tahun 2014);
 - e. Cakupan SDM kesenian (25% pada tahun 2014);
 - f. Cakupan tempat (100% pada tahun 2014);
 - g. Cakupan organisasi (34% pada tahun 2014).

- 8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011)
- a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - b. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2014);
 - c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi (100% pada tahun 2014);
 - d. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2014);
 - f. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (75% pada tahun 2014);
 - g. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari (60% pada tahun 2014);
 - h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - i. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau (100% pada tahun 2014);

- j. Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan (75% pada tahun 2014);
 - k. Tersedianya pelabuhan bagi setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyebrangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan (75% pada tahun 2014);
 - l. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyebrangan dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014);
 - m. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan (100% pada tahun 2014);
 - n. Tersedianya dermaga pada setiap ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar kabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan (100% pada tahun 2014);
 - o. Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar kabupaten/kota dalam provinsi (100% pada tahun 2014);
 - p. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT (100% pada tahun 2014).
- 9) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
- a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : - Pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri,

- perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di lebih 1 kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi (100% pada tahun 2014);
- b. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - c. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (1 sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2014);
 - d. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - e. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi (1 kali/tahun pada tahun 2014);
 - f. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% pada tahun 2014);
 - g. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (100% pada tahun 2014);
 - h. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2014).

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah

kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.